



Siap Revisi Program di Tengah Perjalanan

PONTIANAK - Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Kalimantan Barat kini dijabat Eka Sundari. Jabatan sebelumnya dipegang Didi Budi Satrio. Ia pindah tugas ke Kalimantan Selatan.

Eka Sundari menuturkan siap menjalankan program yang sudah disusun. Kendati demikian, menurutnya tidak menutup kemungkinan program itu akan direvisi karena melakukan penyesuaian dengan kondisi di Kalimantan Barat.

Namun BPK pusat sudah menyusun program sebagai langkah strategis. Diantaranya sistem informasi pemantauan tindaklanjut dan pelatihan untuk inter-

nal dan eksternal.

"Kami mengundang para inspektorat sehingga dapat mengetahui progres dari tindaklanjut yang sudah dilakukan entitas. Semoga ke depan dalam pelaksanaan laporan keuangan kami bisa lebih awal mengetahui tindaklanjut yang sudah dilakukan sehingga proses penyelesaian rekomendasi bisa diselesaikan lebih cepat," jelas Eka usai serah-terima jabatan di Kantor Perwakilan BPK Kalimantan Barat, Selasa (13/12) siang.

Menurutnya sejauh ini komunikasi dengan entitas sudah berjalan baik. Termasuk dalam proses pemeriksaan yang tidak

mendapat hambatan.

Kendati demikian ia menuturkan jika BPK masih menunggu komitmen dari pemerintah daerah. Seperti penyelesaian rekomendasi tindaklanjut dari laporan pemeriksaan yang diberikan BPK.

Sebab ia berharap semua entitas yang diperiksa laporan keuangannya bisa mendapatkan opini WTP. "Kita hanya mengusulkan agar diperbaiki. Intinya laporan itu tanggungjawab mereka. Bimbingan terbuka. Kita bisa memberikan bimbingan tapi tidak bisa memberikan jasa konsultasi," tuturnya.

◆ Ke Halaman 23 kolom 5

Siap Revisi Program di Tengah Perjalanan

Sambungan dari halaman 24

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan pemerintah tetap fokus untuk menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Data progres tindaklanjut hasil pemeriksaan semester I 2016 ini mencapai 71,67 persen. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata nasional 61 persen. Bahkan ada dua kabupaten yang capai lebih

dari 91 persen.

Namun ia mengakui ada kesulitan dalam tindaklanjut rekomendasi itu. Yakni terkait dengan peninggalan sebelum ia menjabat sebagai wakil gubernur.

"Ada temuan sebelum kami menjadi menjabat. Dan itu sangat menyulitkan dalam penyelesaiannya. Tapi itu adalah komitmen dan tetap ditindaklanjuti. Kami tidak bisa lepas tangan begitu saja," jelasnya.

Karena itu ia berharap dukungan dari BPK. Apalagi sudah menjadi kesepakatan semua pemerintah daerah agar melahirkan laporan keuangan yang baik.

"Ini adalah uang rakyat jadi dikelola untuk kepentingan rakyat dengan mekanisme yang diatur. Jika tidak ada rekomendasi itu maka sudah menjalankan mekanisme dengan benar. Rekomendasi sesulit apapun terus dikerjakan," pungkasnya. (mse)